

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Upaya pemerintah sebagai instansi resmi Negara memiliki tujuan dan tugas yang diembannya yaitu melalui pelayanan terbaik kepada semua *stakeholder* dan pengguna lainnya yang terkait dengan instansi itu sendiri. Upaya upaya dalam meningkatkan layanan ditempuh dengan berbagai cara dan strategi sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan penggunaan.

Birokrasi yang dijalankan dari waktu ke waktu secara otomatis harus mengikuti perkembangan dan tata aturan yang memuat informasi yang layak. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan public secara baik menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

”Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab

kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo: 2018:80).”

Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Didalam kebijakan ini tentunya pemerintah didalam mengelola tata kerja suatu instansi harus merujuk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dari mulai tingkat pusat sampai daerah. Berdasarkan peraturan perundangan berupa PP No 29 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *Good Governance*.

Sesuai dengan amanat undang undang No. 17 tahun 2003 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut PP No. 71 tahun 2010, terhadap hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintahan daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yakni : Opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP) dan Pernyataan Menolak Memberikan opini.

**Tabel 1.1**

**Daftar Hasil Opini  
Kota Tasikmalaya  
Tahun 2014-2018**

KOTA	Hasil Opini BPK				
	2014	2015	2016	2017	2018
TASIKMALAYA	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: bpk.go.id,  
2018

Berdasarkan tabel 1.1 BPKAD Kota Tasikmalaya selalu mendapat opini WDP setiap tahunnya dan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 BPKAD pemerintahan Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan terbukti dengan Kota Tasikmalaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Penulis telah melakukan survei pendahuluan dengan melakukan wawancara tidak struktur kepada salah satu pegawai BPKAD di Kota Tasikmalaya mengenai hasil yang diberikan BPK kepada BPKAD Kota Tasikmalaya. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah pada tahun 2014 sampai dengan 2015 SKPD di Kota Tasikmalaya yakni BPKAD baru menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI sehingga masih banyak SKPD yang belum siap dengan perubahan dan pelaksanaan SAP tersebut. Melihat fenomena diatas dapat disimpulkan pada tahun 2014 sampai dengan 2015 di BPKAD Kota Tasikmalaya terjadi penurunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terbukti dengan menurunnya kualitas laporan keuangan karena penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum maksimal, sedangkan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Kota Tasikmalaya berpredikat opini dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas merupakan sebagai acuan dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan dipemerintahan serta transparansi akuntabilitas di BPKAD Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap**

## **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada BPKAD Kota Tasikmalaya)”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kualitas laporan keuangan yang selama ini dihasilkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya optimal dan sesuai harapan. Hal ini terlihat dari opini BPK yang memberikan nilai opini WDP untuk tahun 2014 dan 2015.
2. Prinsip-prinsip akuntabilitas di instansi pemerintah Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintahan Kota Tasikmalaya.
- 2 Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Tasikmalaya.
- 3 Bagaimana Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Di Kota Tasikmalaya.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kota Tasikmalaya serta menjadi syarat menyelesaikan Program Studi Strata Satu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan di BPKAD Di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kinerja instansi pemerintahan BPKAD Di Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kota Tasikmalaya.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan harus di yakini kegunaannya dalam pengembangan umum pengetahuan dan pemecahan masalah yang diteliti. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang harus diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan praktis.

## **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau secara khusus berkaitan mengenai “**Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Tasikmalaya ( Studi Kasus Pada BPKAD Kota Tasikmalaya )**”.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan penelitian ini dapat semakin memperluas wawasan dan referensi serta kemampuan menganalisis masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan judul serupa.

## **1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (SAP, 2017:25). Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus disajikan

secara tepat dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Keputusan Kepala LAN No. 293/IX/6/8/2003).

### 1.6.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Nining Asniar Ridzal (2020)  PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	Data penelitian dianalisis menggunakan statistik inferensial dengan model regresi sederhana yang didahului oleh uji linearitas dan normalitas	Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < \alpha$ sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Hal ini

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	KABUPATEN BUTON		berarti bahwa baik tidaknya akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Jika akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi pemerintahan maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.
2	<p>Urip Santoso (2008)</p> <p>Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud</p>	<p>Data penelitian dianalisis menggunakan statistik inferensial dengan model regresi.</p>	<p>Secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Sedangkan secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud baik secara partial maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu perlu pengkajian atas pelaksanaan praktis dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
3	<p>Fika Mudrikah, Karnila Ali (2020)</p> <p>PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA SKPD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 20. Model analisis data yang digunakan adalah persamaan regresi linier sederhana dan uji interaksi.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) implementasi standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (3) komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dapat menghubungkan antara implementasi standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>
4	<p>Dito Aditia Darma (2019)</p> <p>PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS KEHUTANAN, DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA</p>	<p>Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan program IBM SPSS versi 22</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X1) dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.</p>
5	<p>Ida Ayu Made Dwiki Paramitha (2016)</p>	<p>Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif dan</p>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	PENGARUH KETEPATAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN MANAJERIAL SEKTOR PUBLIK DAN SISTEM PELAPORAN PADA AKUNTABILITAS KINERJA	kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda	signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Tabanan. Sistem pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas kinerja SKPD. Hasil penelitian ini juga menunjukkan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD.

### 1.6.3 Kerangka Konseptual

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (SAP, 2017:25). Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus disajikan secara tepat dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

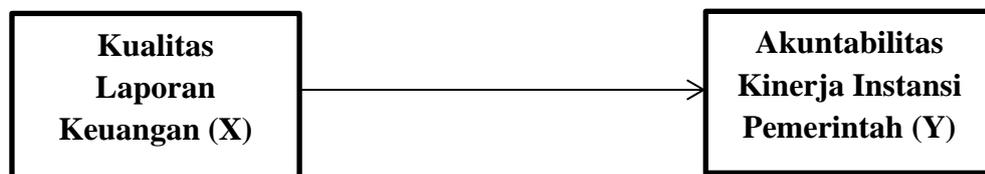
Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat memberi informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi sebagai besar pemakai dalam pengambilan keputusan ini dapat berasal dari dalam (*internal*) maupun luar (*eksternal*) perusahaan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali (Fajri 2017).

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah). Adanya pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas yaitu secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama (Urip, 2018:53). Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas. Karena dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dodi *et al* (2016) yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada pemerintah kota Gorontalo. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 54,7% variabilitas akuntabilitas pemerintah Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh Kualitas pelaporan keuangan.



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

#### **1.6.4 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2016:96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Berikut adalah hipotesis pada penelitian ini:

**“ Terdapat Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ”**